

No. Katalog : 7102025.12

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA 2021

An illustration of a construction site. In the background, there is a tall building under construction with a crane on top. A hot air balloon is floating in the sky. In the foreground, there is a red and white dump truck carrying a load of grey material, and a smaller grey truck. The ground is brown, and there are some yellow and black striped barriers. The letters 'IKKK' are written in large, bold, yellow 3D font in the center of the illustration.

IKKK



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA 2021

<http://mut.bps.go.id>

IKK



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA 2021

ISBN :
No Publikasi : 12000.2150
Katalog : 7102025.12
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah halaman : x + 42 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Penyunting Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Diterbitkan oleh:

@Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dicetak oleh:

CV. Rabbani

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.”

Tim Penyusun
Indeks Kemahalan Konstruksi
Provinsi Sumatera Utara
2021

Penanggung Jawab Umum:

Dr. Syech Suhaimi

Penanggung Jawab Teknis:

Dinar Butar-butar, SE, M.Si

Koordinator:

Ir. T. Maiza Inaya, MM

Penulis dan Pengolah Data:

Nova Puspita Widasari, SST, M.Si

Infografis :

Martina Situmorang, SST, MA

Desain Cover:

Prio Arif Budiman

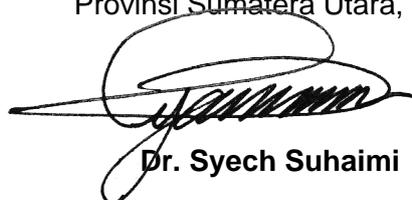
KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara 2021 merupakan publikasi tahunan yang memuat informasi angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. Kota acuan yang digunakan pada tahun 2021 adalah Kota Makassar. Kota acuan sebelumnya adalah Semarang di tahun 2018-2019 dan Surabaya di tahun 2015-2017.

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) khusus bahan bangunan/ konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Data yang diolah berasal dari data harga triwulan III, dan IV tahun 2020 serta triwulan I, dan II tahun 2021. Penghitungan diagram timbang IKK menggunakan data dari Bill of Quantity (BoQ), Buku Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). IKK tahun 2021 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini terutama kepada perusahaan atau responden atas kerjasamanya dalam memberikan data dasar yang diperlukan. Semoga publikasi ini bermanfaat serta memenuhi harapan pengguna data.

Medan, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara,



Dr. Syech Suhaimi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Lampiran	x
I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang	3
Tujuan	4
Cakupan	4
Konsep dan Definisi	4
II. METODOLOGI	
Indeks Kemahalan Konstruksi	9
Metode Penghitungan IKK	9
Penghitungan Diagram Timbang IKK.....	12
Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2021.....	14
Peta Kawasan Hutan.....	15
Peta Topografi.....	16
Dana Alokasi Umum	16
III. ULASAN RINGKAS	
Kondisi Geografis	20
Kondisi Transportasi	21
Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara	23
Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	24
Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Utara	26
Lampiran	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Panjang dan Kondisi Jalan di Sumatera Utara, 2020.....	22
Tabel 3.2	Rangking IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021	25

<https://sumut.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kawasan hutan menurut wilayah kepulauan Indonesia	15
Gambar 2.2	Topografi menurut wilayah kepulauan Indonesia	16
Gambar 3.1	Persentase luas wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2020	21
Gambar 3.4	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2021	23
Gambar 3.5	Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021	24
Gambar 3.6	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota, 2021	25

<https://sumut.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Provinsi, 2018 (Kota Semarang = 100)	30
Lampiran 2	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang = 100)	31
Lampiran 3	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Provinsi, 2020 (Kota Semarang = 100)	32
Lampiran 4	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Provinsi, 2021 (Kota Makassar = 100)	33
Lampiran 5	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Kabupaten/Kota 2018 Provinsi Sumatera Utara (Kota Semarang = 100)	34
Lampiran 6	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Kabupaten/Kota 2019 Provinsi Sumatera Utara (Kota Semarang = 100)	35
Lampiran 7	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Kabupaten/Kota 2020 Provinsi Sumatera Utara (Kota Semarang = 100)	36
Lampiran 8	Indeks <i>Kemahalan</i> Konstruksi Kabupaten/Kota 2021 Provinsi Sumatera Utara (Kota Makassar = 100)	37
Lampiran 9	Alokasi dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018	38
Lampiran 10	Alokasi dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019	39
Lampiran 11	Alokasi dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020	40
Lampiran 12	Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021	41
Lampiran 13	Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022	42

PENDAHULUAN

<https://sumut.pps.go.id>

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas masing-masing daerah. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD hanya berdasar asas desentralisasi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Hingga saat ini, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, maka menjadi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan Daerah diserahkan ke pemerintah daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu pendapatan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan dan berasal dari transfer pemerintah pusat. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu komponen penting dalam penghitungan DAU. Badan Pusat Statistik mulai melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2003 untuk keperluan penghitungan Dana Alokasi Umum 2003 yang dilanjutkan hingga sekarang.

Tujuan

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan publikasi yang memuat informasi angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Sumatera Utara dengan provinsi lainnya.

Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2021.

Konsep dan Definisi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. Kota acuan yang digunakan pada tahun 2021 adalah Kota Makassar.

Bahan bangunan/ konstruksi adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam

harga sewa ini adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, biaya jasa operator, dan biaya bahan bakar. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal yaitu 8 tahun.

<https://sumut.bps.go.id>

METODOLOGI

<https://sumut.bps.go.id>

II. METODOLOGI

Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot/diagram timbang. Data harga dan upah didapat dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (HKK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Survei tersebut dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun yaitu pada bulan: Januari, April, Juli, dan Oktober.

Bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari *Bill of Quantity (BOQ)*. *BOQ* adalah realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan yang ditentukan. Kelima jenis bangunan ini yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk pertanian; bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya.

Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_l = \sum_{m=1}^n p_m q_m$$

NK_l = nilai komponen ke- l pada masing-masing sistem dari suatu bangunan di kabupaten/kota

p_m = harga material/upah/sewa alat ke- m

- q_m = kuantitas/volume material/upah/sewa ke-m
 n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke- l

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity (PPP)* sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy (CPD)*. Model regresi *CPD* adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_l = \alpha_x C_x + \beta_l P_l + \epsilon_{xl}$$

dengan:

- NK_l = nilai komponen ke- l
 C_x = dummy kabupaten/kota ke-x
 P_l = dummy komponen ke- l dalam suatu sistem dan bangunan
 ϵ_{xl} = galat
 α_x dan β_l = Koefisien regresi

$$PPP (Purchasing Power Parity)_{sistem_k} = \exp (\alpha_x)$$

$$PPP_{sistem_k} = \left(\prod_{l=1}^n \frac{NK_{klx}}{NK_{kl0}} \right)^{\frac{1}{n}}$$

dengan:

- PPP_{sistem_k} = *purchasing power parity* sistem ke-k
 NK_{klx} = komponen ke- l , sistem ke-k, di kabupaten/kota ke-x
 NK_{kl0} = komponen ke- l , sistem ke-k, di kabupaten/kota acuan
 n = jumlah komponen dalam suatu sistem

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung **PPP bangunan** menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_j} = \prod_{k=1}^n (PPP_{Sistem_k})^{w_{2k}}$$

dengan :

$PPP_{bangunan_j}$ = purchasing power parity bangunan ke-j

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung **PPP proyek** dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{j=1}^n PPP_{Bangunan_j} \right)^{\frac{1}{n}}$$

dengan :

PPP_{proyek_i} = purchasing power parity proyek ke-i

n = Jumlah bangunan dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan **pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional**, dan sebagainya.

$$C_0 = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung **IKK kabupaten/kota** menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_{1i}} \right) \cdot 100$$

Dengan :

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

Penghitungan Diagram Timbang IKK

Penghitungan diagram timbang IKK menggunakan data dari *Bill of Quantity* (*BoQ*), Buku Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penghitungan IKK 2021 menggunakan data *BoQ* tahun 2012-2020. *BoQ* ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing. *BoQ* yang dikumpulkan dalam survei ini adalah *BoQ* realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2012-2020 di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu

1. Gedung dan bangunan (*Buildings*)
2. Jalan, irigasi dan jaringan (*Roads, Irrigations, and systems*)
3. Bangunan lainnya (*Other Constructions*)

➤ Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

➤ Jalan, irigasi dan jaringan

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.

2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/ tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar gelombang mikro, dan bangunan stasiun bumi kecil/ stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah, saluran drainase pada gedung.
 - f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 - h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 - i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

➤ *Bangunan lainnya*

Jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan

sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2021

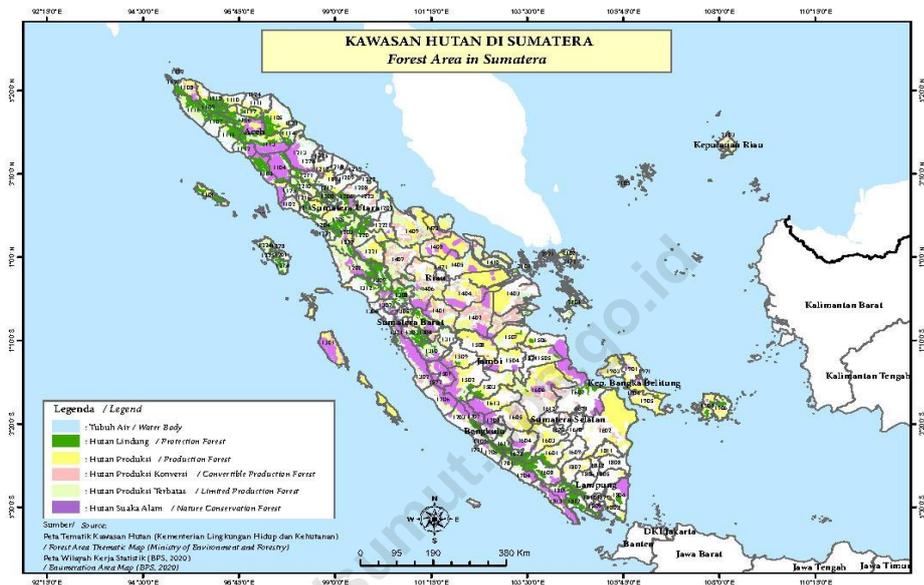
IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *BoQ* tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal tersebut mengakibatkan *BoQ* 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan *BoQ* terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2021 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan *updating BoQ* tahun 2020.

IKK tahun 2021 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan April 2021. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2021 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Kota acuan yang digunakan pada tahun 2021 adalah Kota Makassar, berubah dari Kota Semarang di tahun 2018 - 2020. Kota acuan IKK sebelumnya yaitu Kota Surabaya untuk IKK 2015 - 2017 dan Kota Samarinda untuk IKK 2012 - 2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

Peta Kawasan Hutan

Peta kawasan hutan digunakan sebagai gambaran persebaran hutan di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum adanya kawasan hutan berpengaruh terhadap kelancaran arus distribusi barang dari suatu kabupaten ke kabupaten lainnya sehingga harga suatu komoditi meningkat (IKK tinggi). Hal ini umum terjadi di kabupaten di luar pulau Jawa



Gambar 2.1. Kawasan hutan menurut wilayah kepulauan di Indonesia

Danau/Tubuh Air adalah kumpulan air yang besarnya tergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau dan samudera.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah pada umumnya berada di wilayah pegunungan.

Hutan Suaka Alam adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Peta Topografi

Peta topografi ini memberikan gambaran mengenai wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah. Suatu kabupaten yang terletak di pegunungan biasanya memiliki akses distribusi barang yang sulit. Hal ini menyebabkan tingginya harga suatu komoditas di daerah tersebut akibat dari transportasi yang langka. Kondisi ini umum terjadi di kabupaten di luar pulau Jawa.



Gambar 2.2. Topografi menurut wilayah kepulauan di Indonesia

Topografi adalah studi mengenai bentuk relief permukaan bumi yang berisi tentang informasi tentang ketinggian permukaan tanah pada suatu tempat terhadap permukaan laut, yang digambarkan dengan garis-garis kontur.

Peta Topografi bersumber dari www.naturelearthdata.com.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS Daerah

Rumus Formula DAU

$$DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)$$

Keterangan:

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Variabel DAU

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2021

SUMATERA UTARA

IKK

adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. Kota acuan IKK tahun 2021 adalah Kota Makassar = 100

3 IKK Terendah

3 IKK Tertinggi

3. Nias Utara
110,69

2. Nias Barat
111,92

1. Nias Selatan
116,98

1. Binjai
92,56

2. Pematangsiantar
94,97

3. Deli Serdang
95,32



Nilai dan Rank IKK Provinsi Sumatera Utara



<https://sumut.bps.go.id>

III. ULASAN RINGKAS

Kondisi Geografis

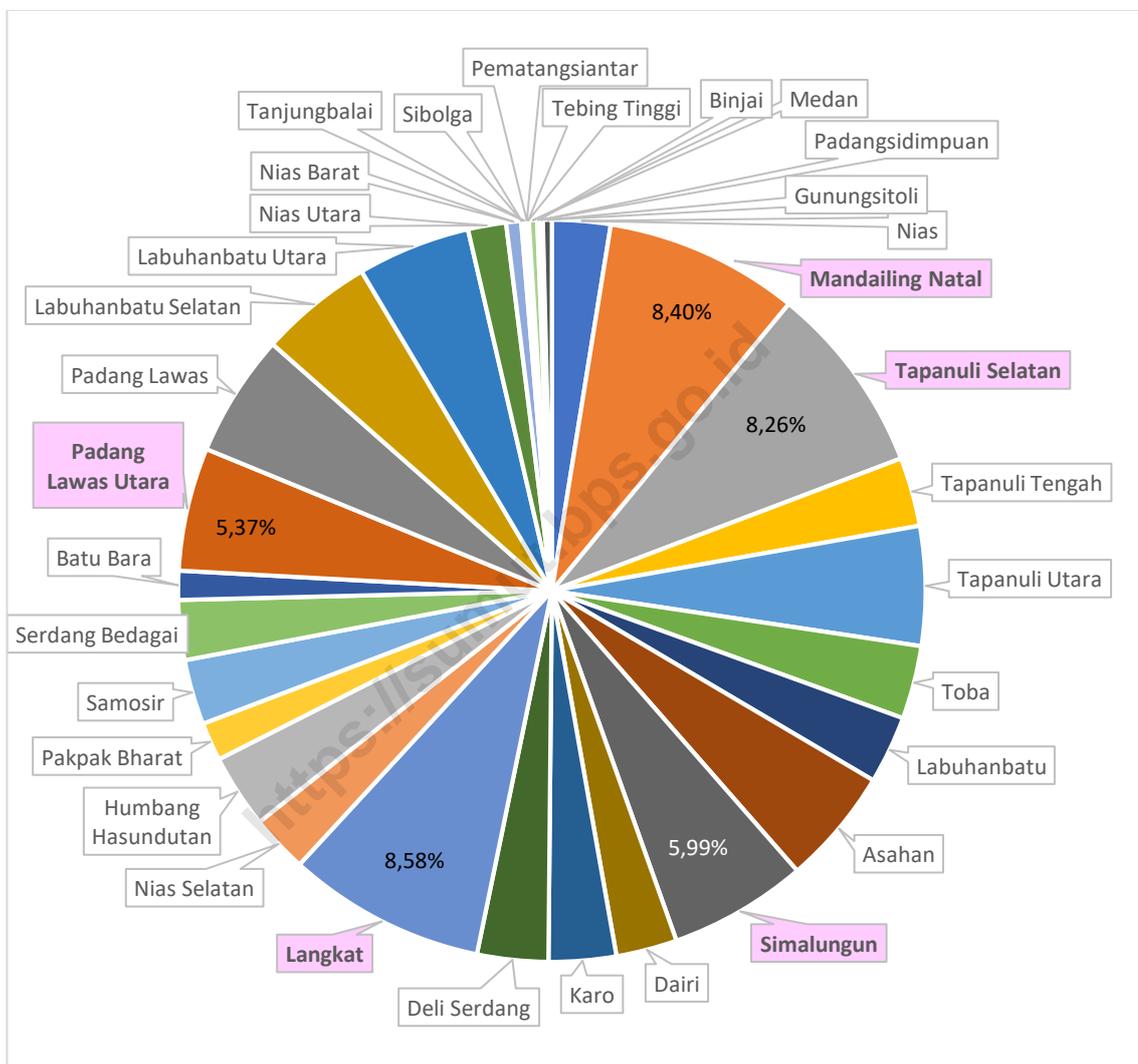
Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, dengan letak astronomis berada pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah Utara, Negara Malaysia (Selat Malaka) di sebelah Timur, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Tingkat kemiringan tanah di Sumatera Utara antara 0-12 % seluas 65,51 persen, antara 12-40 % seluas 8,64 persen, dan di atas 40 % seluas 24,28 persen. Sedangkan luas wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57 persen. Wilayah bagian Timur relatif datar, bagian Tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Secara geografis, wilayah Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 3 kelompok wilayah/kawasan, yaitu: kawasan Pantai Barat, kawasan Dataran Tinggi Bukit Barisan, dan kawasan Pantai Timur.

Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Luas daratan Sumatera Utara sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia atau mencapai 72.981,23 km². Sebagian besar luas daratan berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil. Kabupaten Langkat memiliki wilayah terluas di Sumatera Utara dengan luas 6.262,00 km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas daratan Sumatera Utara diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km² atau sekitar 8,40

persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km² atau sekitar 8,26 persen, Simalungun dengan luas 4.369 km² atau sekitar 5,99 persen dan Padang Lawas Utara dengan luas 3918,05 km² atau sekitar 5,37 persen. Sedangkan luas daerah kabupaten/kota terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas daratan Sumatera Utara.



Gambar 3.1 Persentase luas wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2021

Kondisi Transportasi

Jalan merupakan parasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kelancaran arus distribusi berbagai kebutuhan pokok

masyarakat sangat tergantung dari kondisi jalan yang ditempuh sehingga biaya angkut dapat diminimalisir.

Panjang jalan di Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai 40.736,47 km. Berdasarkan atas kewenangan pemeliharaan jalan dibagi atas jalan negara 2.629,66 km, jalan provinsi 3.005,65 km dan jalan kabupaten/kota 35.101,16 km.

Kondisi jalan di Sumatera Utara masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Khusus untuk jalan Provinsi, kondisi rusak, rusak berat dan tidak terperinci ada sepanjang 532,79 km atau 17,73 persen dari total panjang jalan Provinsi di Sumatera Utara.

Dilihat dari tabel 3.1, kondisi jalan provinsi pada tahun 2020, jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 1.201,35 km, yang tergolong kondisi sedang tercatat sepanjang 1.271,51 km, kondisi rusak tercatat sepanjang 232,02 km dan kondisi rusak berat tercatat sepanjang 300,77 km.

Tabel 3.1. Panjang dan Kondisi Jalan di Sumatera Utara tahun 2020

Uraian	2020
(1)	(3)
Panjang Jalan (km)	
Negara	2.629,66
Provinsi	3.005,65
Kabupaten/kota	35.101,16
Kondisi Jalan Provinsi (km)	
Baik	1.201,35
Sedang	1.271,51
Rusak	232,02
Rusak Berat	300,77
Tidak Terinci	0,00

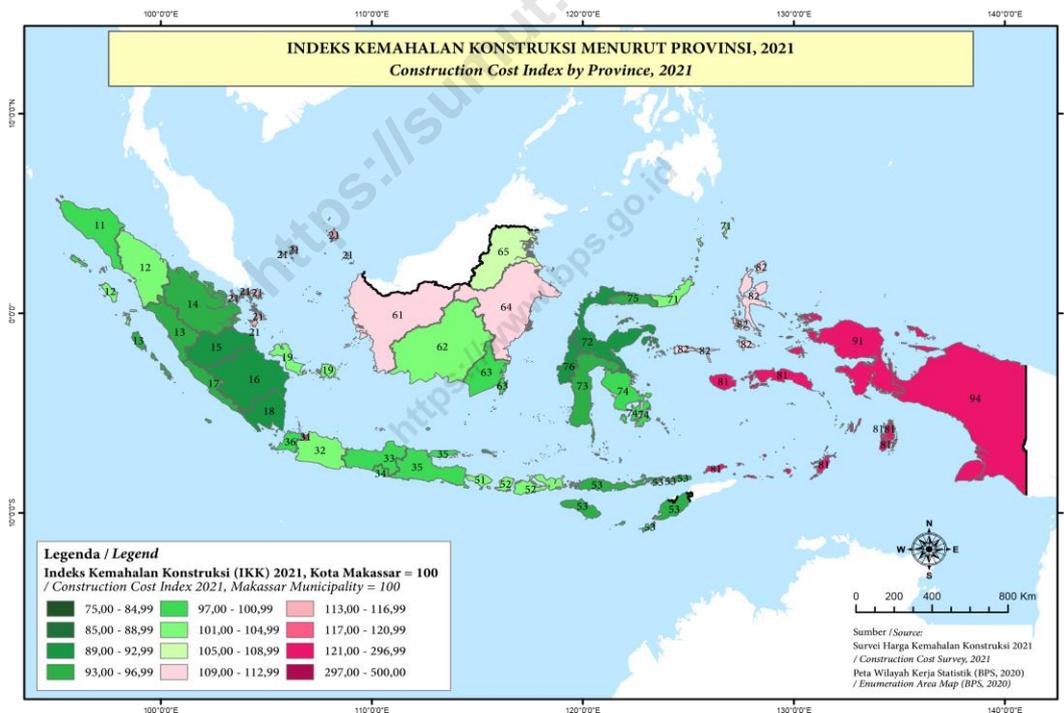
Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 552.046 unit, yang mencakup mobil penumpang, bus, mobil barang dan sepeda motor. Dari total kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2020, sebanyak 24.755 unit atau 4,48 persen merupakan jenis kendaraan mobil barang.

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak kabupaten/kota sebagai produsen/sumber barang/jasa menuju setiap lokasi pembangunan konstruksi di Sumatera Utara. Akses barang masuk dari luar Provinsi Sumatera Utara dapat melalui darat yang diangkut oleh kendaraan umum, sedangkan transportasi udara masuk melalui Bandar Udara Kualanamu. Moda transportasi laut juga menjadi sarana pendukung transportasi Provinsi Sumatera Utara dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Akses barang masuk melalui transportasi laut melalui Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan.

Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2021, nilai IKK Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 101,63. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Sumatera Utara 1,63 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kota acuan (Kota Makassar).



Gambar 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2021

Pada tahun 2021, IKK tertinggi tercatat di Provinsi Papua sebesar 207,11 sedangkan IKK terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 90,50. Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi, Provinsi Sumatera Utara menduduki urutan ke-14

dari 34 Provinsi di Indonesia. Sementara, jika dilihat menurut kawasannya, IKK Provinsi Sumatera Utara menempati urutan pertama dibandingkan 9 provinsi yang ada di kawasan wilayah Sumatera.

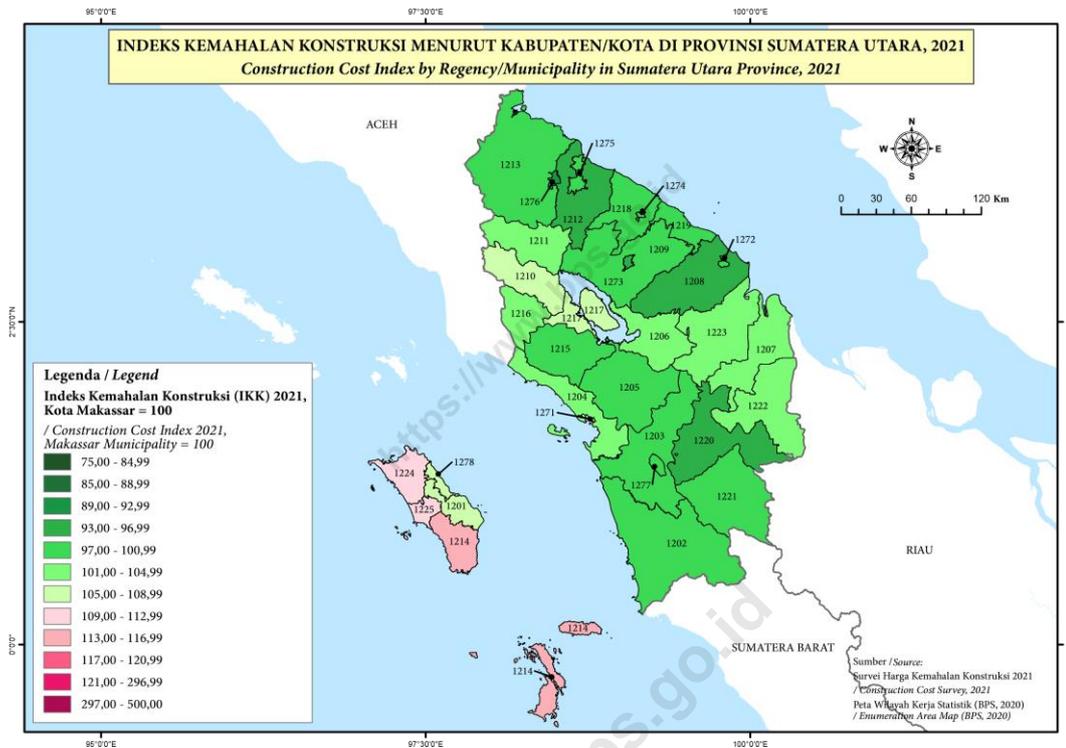


Gambar 3.5. Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran nilai dan ranking IKK Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 menduduki ranking ke-14, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Karena merupakan indeks spasial, kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan/penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan (Kota Makassar).

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, nilai IKK tahun 2021 paling tinggi adalah Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 478,12 kemudian disusul Kabupaten Intan Jaya sebesar 447,97 serta Kabupaten Puncak Jaya sebesar 446,40. Ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Papua. Nilai IKK terendah tercatat di Kota Malaka (Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar 81,00 kemudian disusul Kota Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) sebesar 81,17; serta Kabupaten Polewali Mandar (Provinsi Sulawesi Barat) sebesar 81,41.



Gambar 3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota, 2021

Indeks Kemahalan Konstruksi di Sumatera Utara tercatat paling tinggi di Kabupaten Nias Selatan yaitu sebesar 116,98 kemudian Kabupaten Nias Barat sebesar 111,92 dan Kabupaten Nias Utara sebesar 110,69. Nilai IKK terendah di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Binjai sebesar 92,56, kemudian Kota Pematangsiantar sebesar 94,97 dan Kabupaten Deli Serdang sebesar 95,32.

Tabel 3.2. Rangka IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021

Uraian	2021
(1)	(2)
Nilai IKK tertinggi	
Nias Selatan	116,98
Nias Barat	111,92
Nias Utara	110,69
Nilai IKK terendah	
Kota Binjai	92,56
Kota Pematangsiantar	94,97
Kabupaten Deli Serdang	95,32

Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Utara

Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Suatu daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Besaran DAU per Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 kami sajikan pada Lampiran 13

Daerah yang tercatat memperoleh alokasi DAU paling besar di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah Kota Medan dengan DAU sebesar 1.526 miliar rupiah kemudian disusul Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.354 miliar rupiah. Sedangkan kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling rendah adalah Pakpak Bharat dengan DAU sebesar 318,94 miliar rupiah.

LAMPIRAN

<https://sputt.bps.go.id>

Lampiran 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2018 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,39
2	1200	Sumatera Utara	101,47
3	1300	Sumatera Barat	99,10
4	1400	Riau	96,86
5	1500	Jambi	92,53
6	1600	Sumatera Selatan	97,64
7	1700	Bengkulu	96,76
8	1800	Lampung	89,31
9	1900	Kep Bangka Belitung	99,29
10	2100	Kepulauan Riau	127,70
11	3100	DKI Jakarta	109,14
12	3200	Jawa Barat	103,63
13	3300	Jawa Tengah	98,64
14	3400	DI Yogyakarta	104,88
15	3500	Jawa Timur	103,86
16	3600	Banten	100,22
17	5100	Bali	122,95
18	5200	Nusa Tenggara Barat	100,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,79
20	6100	Kalimantan Barat	113,95
21	6200	Kalimantan Tengah	102,31
22	6300	Kalimantan Selatan	105,09
23	6400	Kalimantan Timur	114,13
24	6500	Kalimantan Utara	113,25
25	7100	Sulawesi Utara	110,83
26	7200	Sulawesi Tengah	97,04
27	7300	Sulawesi Selatan	101,69
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,96
29	7500	Gorontalo	96,46
30	7600	Sulawesi Barat	91,33
31	8100	Maluku	126,39
32	8200	Maluku Utara	116,55
33	9100	Papua Barat	134,02
34	9400	Papua	227,90

Lampiran 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	98,68
2	1200	Sumatera Utara	102,79
3	1300	Sumatera Barat	93,72
4	1400	Riau	94,92
5	1500	Jambi	94,38
6	1600	Sumatera Selatan	94,50
7	1700	Bengkulu	94,74
8	1800	Lampung	88,84
9	1900	Kep Bangka Belitung	101,27
10	2100	Kepulauan Riau	128,34
11	3100	DKI Jakarta	114,06
12	3200	Jawa Barat	103,03
13	3300	Jawa Tengah	99,93
14	3400	DI Yogyakarta	103,42
15	3500	Jawa Timur	103,68
16	3600	Banten	95,84
17	5100	Bali	119,10
18	5200	Nusa Tenggara Barat	98,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,03
20	6100	Kalimantan Barat	111,53
21	6200	Kalimantan Tengah	101,90
22	6300	Kalimantan Selatan	100,90
23	6400	Kalimantan Timur	114,37
24	6500	Kalimantan Utara	112,11
25	7100	Sulawesi Utara	108,32
26	7200	Sulawesi Tengah	91,98
27	7300	Sulawesi Selatan	97,34
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,45
29	7500	Gorontalo	97,45
30	7600	Sulawesi Barat	92,27
31	8100	Maluku	123,02
32	8200	Maluku Utara	119,11
33	9100	Papua Barat	132,67
34	9400	Papua	218,59

Lampiran 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2020 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,38
2	1200	Sumatera Utara	99,84
3	1300	Sumatera Barat	92,96
4	1400	Riau	95,72
5	1500	Jambi	90,35
6	1600	Sumatera Selatan	92,69
7	1700	Bengkulu	91,78
8	1800	Lampung	88,67
9	1900	Kep Bangka Belitung	101,90
10	2100	Kepulauan Riau	121,50
11	3100	DKI Jakarta	116,84
12	3200	Jawa Barat	103,93
13	3300	Jawa Tengah	97,31
14	3400	DI Yogyakarta	102,29
15	3500	Jawa Timur	102,44
16	3600	Banten	97,05
17	5100	Bali	115,04
18	5200	Nusa Tenggara Barat	99,13
19	5300	Nusa Tenggara Timur	97,95
20	6100	Kalimantan Barat	110,92
21	6200	Kalimantan Tengah	99,55
22	6300	Kalimantan Selatan	100,32
23	6400	Kalimantan Timur	109,69
24	6500	Kalimantan Utara	109,90
25	7100	Sulawesi Utara	104,11
26	7200	Sulawesi Tengah	90,74
27	7300	Sulawesi Selatan	95,11
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,09
29	7500	Gorontalo	94,12
30	7600	Sulawesi Barat	89,48
31	8100	Maluku	124,38
32	8200	Maluku Utara	120,52
33	9100	Papua Barat	129,66
34	9400	Papua	208,90

Lampiran 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	99,03
2	1200	Sumatera Utara	101,63
3	1300	Sumatera Barat	94,77
4	1400	Riau	94,85
5	1500	Jambi	92,76
6	1600	Sumatera Selatan	91,58
7	1700	Bengkulu	94,42
8	1800	Lampung	92,57
9	1900	Kep Bangka Belitung	101,21
10	2100	Kepulauan Riau	116,80
11	3100	DKI Jakarta	121,42
12	3200	Jawa Barat	102,60
13	3300	Jawa Tengah	97,65
14	3400	DI Yogyakarta	100,31
15	3500	Jawa Timur	100,80
16	3600	Banten	97,64
17	5100	Bali	103,17
18	5200	Nusa Tenggara Barat	101,93
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,58
20	6100	Kalimantan Barat	111,45
21	6200	Kalimantan Tengah	101,47
22	6300	Kalimantan Selatan	99,25
23	6400	Kalimantan Timur	109,81
24	6500	Kalimantan Utara	106,00
25	7100	Sulawesi Utara	104,43
26	7200	Sulawesi Tengah	90,50
27	7300	Sulawesi Selatan	96,84
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,38
29	7500	Gorontalo	95,07
30	7600	Sulawesi Barat	90,72
31	8100	Maluku	124,61
32	8200	Maluku Utara	112,31
33	9100	Papua Barat	130,59
34	9400	Papua	207,11

Lampiran 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2018 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1201	Nias	107,91
2	1202	Mandailing Natal	102,03
3	1203	Tapanuli Selatan	101,40
4	1204	Tapanuli Tengah	95,97
5	1205	Tapanuli Utara	101,10
6	1206	Toba	104,05
7	1207	Labuhanbatu	99,45
8	1208	Asahan	95,45
9	1209	Simalungun	106,46
10	1210	Dairi	107,06
11	1211	Karo	105,59
12	1212	Deli Serdang	96,40
13	1213	Langkat	89,99
14	1214	Nias Selatan	101,82
15	1215	Humbang Hasundutan	95,88
16	1216	Pakpak Bharat	105,55
17	1217	Samosir	107,69
18	1218	Serdang Bedagai	102,66
19	1219	Batu Bara	101,29
20	1220	Padang Lawas Utara	102,51
21	1221	Padang Lawas	104,28
22	1222	Labuhanbatu Selatan	104,00
23	1223	Labuhanbatu Utara	96,45
24	1224	Nias Utara	107,23
25	1225	Nias Barat	104,25
26	1271	Sibolga	106,45
27	1272	Tanjungbalai	86,52
28	1273	Pematangsiantar	98,31
29	1274	Tebing Tinggi	97,99
30	1275	Medan	105,75
31	1276	Binjai	95,19
32	1277	Padangsidempuan	106,65
33	1278	Gunungsitoli	109,99

Lampiran 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2019 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1201	Nias	114,17
2	1202	Mandailing Natal	100,55
3	1203	Tapanuli Selatan	104,88
4	1204	Tapanuli Tengah	100,30
5	1205	Tapanuli Utara	105,39
6	1206	Toba	102,28
7	1207	Labuhanbatu	106,74
8	1208	Asahan	94,53
9	1209	Simalungun	98,60
10	1210	Dairi	105,39
11	1211	Karo	102,50
12	1212	Deli Serdang	101,01
13	1213	Langkat	98,74
14	1214	Nias Selatan	114,34
15	1215	Humbang Hasundutan	99,74
16	1216	Pakpak Bharat	102,81
17	1217	Samosir	105,80
18	1218	Serdang Bedagai	99,21
19	1219	Batu Bara	97,63
20	1220	Padang Lawas Utara	104,42
21	1221	Padang Lawas	103,40
22	1222	Labuhanbatu Selatan	107,71
23	1223	Labuhanbatu Utara	102,17
24	1224	Nias Utara	111,02
25	1225	Nias Barat	109,90
26	1271	Sibolga	108,25
27	1272	Tanjungbalai	94,30
28	1273	Pematangsiantar	91,04
29	1274	Tebing Tinggi	97,37
30	1275	Medan	102,11
31	1276	Binjai	100,63
32	1277	Padangsidempuan	102,24
33	1278	Gunungsitoli	107,45

Lampiran 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2020 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1201	Nias	106,76
2	1202	Mandailing Natal	100,05
3	1203	Tapanuli Selatan	102,53
4	1204	Tapanuli Tengah	99,56
5	1205	Tapanuli Utara	101,84
6	1206	Toba	102,63
7	1207	Labuhanbatu	104,83
8	1208	Asahan	92,13
9	1209	Simalungun	97,93
10	1210	Dairi	101,99
11	1211	Karo	101,54
12	1212	Deli Serdang	96,45
13	1213	Langkat	97,66
14	1214	Nias Selatan	114,81
15	1215	Humbang Hasundutan	103,44
16	1216	Pakpak Bharat	101,95
17	1217	Samosir	100,35
18	1218	Serdang Bedagai	92,22
19	1219	Batu Bara	95,50
20	1220	Padang Lawas Utara	96,91
21	1221	Padang Lawas	97,36
22	1222	Labuhanbatu Selatan	102,65
23	1223	Labuhanbatu Utara	103,91
24	1224	Nias Utara	106,38
25	1225	Nias Barat	108,66
26	1271	Sibolga	105,07
27	1272	Tanjungbalai	96,33
28	1273	Pematangsiantar	86,51
29	1274	Tebing Tinggi	96,25
30	1275	Medan	96,87
31	1276	Binjai	89,67
32	1277	Padangsidempuan	97,03
33	1278	Gunungsitoli	101,98

Lampiran 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2021 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1201	Nias	108,77
2	1202	Mandailing Natal	97,04
3	1203	Tapanuli Selatan	99,33
4	1204	Tapanuli Tengah	102,09
5	1205	Tapanuli Utara	100,57
6	1206	Toba	101,31
7	1207	Labuhanbatu	101,44
8	1208	Asahan	95,88
9	1209	Simalungun	100,94
10	1210	Dairi	106,07
11	1211	Karo	103,23
12	1212	Deli Serdang	95,32
13	1213	Langkat	99,94
14	1214	Nias Selatan	116,98
15	1215	Humbang Hasundutan	100,58
16	1216	Pakpak Bharat	103,85
17	1217	Samosir	106,17
18	1218	Serdang Bedagai	98,12
19	1219	Batu Bara	97,32
20	1220	Padang Lawas Utara	96,93
21	1221	Padang Lawas	97,65
22	1222	Labuhanbatu Selatan	102,44
23	1223	Labuhanbatu Utara	102,37
24	1224	Nias Utara	110,69
25	1225	Nias Barat	111,92
26	1271	Sibolga	107,74
27	1272	Tanjungbalai	99,98
28	1273	Pematangsiantar	94,97
29	1274	Tebing Tinggi	98,34
30	1275	Medan	99,62
31	1276	Binjai	92,56
32	1277	Padangsidempuan	100,07
33	1278	Gunungsitoli	108,04

Lampiran 9. Alokasi dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018

Kode	Kabupaten/Kota	Alokasi 2018 (000 Rp)	Realisasi 2018 (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1200	Provinsi Sumatera Utara	2.629.224.545.	2.629.224.545	100,00
1201	Nias	430.091.477	430.091.477	100,00
1202	Mandailing Natal	783.200.132	783.200.132	100,00
1203	Tapanuli Selatan	644.304.467	644.304.467	100,00
1204	Tapanuli Tengah	627.027.553	627.027.553	100,00
1205	Tapanuli Utara	639.394.068	639.394.068	100,00
1206	Toba	528.490.802	528.490.802	100,00
1207	Labuhanbatu	684.408.474	684.408.474	100,00
1208	Asahan	877.794.641	877.794.641	100,00
1209	Simalungun	1.209.194.704	1.209.194.704	100,00
1210	Dairi	612.745.792	612.745.792	100,00
1211	Karo	738.378.312	738.378.312	100,00
1212	Deli Serdang	1.468.561.952	1.468.561.952	100,00
1213	Langkat	1.179.392.864	1.179.392.864	100,00
1214	Nias Selatan	556.410.357	556.410.357	100,00
1215	Humbang Hasundutan	523.818.445	523.818.445	100,00
1216	Pakpak Bharat	339.271.690	339.271.690	100,00
1217	Samosir	453.737.230	453.737.230	100,00
1218	Serdang Bedagai	763.943.386	763.943.386	100,00
1219	Batu Bara	602.464.355	602.464.355	100,00
1220	Padang Lawas Utara	537.469.609	537.469.609	100,00
1221	Padang Lawas	521.562.942	521.562.942	100,00
1222	Labuhanbatu Selatan	504.525.796	504.525.796	100,00
1223	Labuhanbatu Utara	588.021.836	588.021.836	100,00
1224	Nias Utara	413.837.391	413.837.391	100,00
1225	Nias Barat	348.251.352	348.251.352	100,00
1271	Sibolga	405.554.215	405.554.215	100,00
1272	Tanjungbalai	418.666.416	418.666.416	100,00
1273	Pematangsiantar	583.106.207	583.106.207	100,00
1274	Tebing Tinggi	409.399.195	409.399.195	100,00
1275	Medan	1.583.624.375	1.583.624.375	100,00
1276	Binjai	564.377.582	564.377.582	100,00
1277	Padangsidempuan	498.768.033	498.768.033	100,00
1278	Gunungsitoli	426.758.929	426.758.929	100,00

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>

Lampiran 10. Alokasi dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

Kode	Kabupaten/Kota	Alokasi 2019 (000 Rp)	Realisasi 2019 (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Provinsi Sumatera Utara	2.754.578.133	2.754.578.133	100,00
1201	Nias	445.430.278	445.430.278	100,00
1202	Mandailing Natal	822.447.946	817.263.946	99,37
1203	Tapanuli Selatan	676.183.229	676.183.229	100,00
1204	Tapanuli Tengah	673.021.721	673.021.721	100,00
1205	Tapanuli Utara	662.711.066	662.711.066	100,00
1206	Toba	548.690.496	548.690.496	100,00
1207	Labuhanbatu	715.851.140	711.594.553	99,41
1208	Asahan	917.363.719	917.363.719	100,00
1209	Simalungun	1.261.415.709	1.261.415.709	100,00
1210	Dairi	633.471.400	631.990.848	99,77
1211	Karo	761.654.097	759.734.097	99,75
1212	Deli Serdang	1.528.112.060	1.525.521.094	99,83
1213	Langkat	1.229.427.123	1.229.427.123	100,00
1214	Nias Selatan	589.776.225	589.776.225	100,00
1215	Humbang Hasundutan	537.926.193	537.926.193	100,00
1216	Pakpak Bharat	356.431.429	356.431.429	100,00
1217	Samosir	466.392.298	465.281.884	99,76
1218	Serdang Bedagai	803.443.971	802.291.971	99,86
1219	Batu Bara	630.941.496	630.941.496	100,00
1220	Padang Lawas Utara	555.990.539	555.990.539	100,00
1221	Padang Lawas	541.654.796	541.654.796	100,00
1222	Labuhanbatu Selatan	525.098.108	524.727.970	99,93
1223	Labuhanbatu Utara	612.604.336	612.604.336	100,00
1224	Nias Utara	429.813.062	429.621.062	99,96
1225	Nias Barat	360.613.977	360.613.977	100,00
1271	Sibolga	428.921.402	425.775.229	99,27
1272	Tanjungbalai	451.056.356	451.056.356	100,00
1273	Pematangsiantar	617.348.795	617.348.795	100,00
1274	Tebing Tinggi	435.234.831	435.234.831	100,00
1275	Medan	1.717.625.774	1.690.978.728	98,45
1276	Binjai	594.193.792	587.346.239	98,85
1277	Padangsidempuan	525.198.898	525.198.898	100,00
1278	Gunungsitoli	447.379.682	447.379.682	100,00

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>

Lampiran 11. Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

Kode	Kabupaten/Kota	Alokasi 2020 (000 Rp)	Realisasi 2020 (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1200	Provinsi Sumatera Utara	2.731.961.034	2,474,465,343	90.57
1201	Nias	465.142.783	417,880,380	89.84
1202	Mandailing Natal	834.679.253	751,402,758	90.02
1203	Tapanuli Selatan	679.281.327	604,693,533	89.02
1204	Tapanuli Tengah	686.705.559	609,816,945	88.80
1205	Tapanuli Utara	683.984.244	659,877,311	96.48
1206	Toba	579.155.648	519,088,428	89.63
1207	Labuhanbatu	722.758.550	633,797,327	87.69
1208	Asahan	923.774.467	830,586,749	89.91
1209	Simalungun	1.263.388.980	1,136,239,874	89.94
1210	Dairi	634.555.766	575,549,527	90.70
1211	Karo	770.398.674	687,569,658	89.25
1212	Deli Serdang	1.541.866.237	1,376,847,320	89.30
1213	Langkat	1.233.290.509	1,099,658,531	89.16
1214	Nias Selatan	685.495.107	626,743,578	91.43
1215	Humbang Hasundutan	543.828.964	489,171,029	89.95
1216	Pakpak Bharat	362.785.229	323,371,339	89.14
1217	Samosir	470.064.939	418,883,094	89.11
1218	Serdang Bedagai	810.593.236	727,436,456	89.74
1219	Batu Bara	635.787.457	565,927,402	89.01
1220	Padang Lawas Utara	598.032.227	521,528,022	87.21
1221	Padang Lawas	564.296.664	496,576,468	88.00
1222	Labuhanbatu Selatan	532.094.945	479,785,624	90.17
1223	Labuhanbatu Utara	623.121.081	560,374,058	89.93
1224	Nias Utara	439.234.979	392,014,347	89.25
1225	Nias Barat	371.229.195	332,435,947	89.55
1271	Sibolga	429.362.930	391,676,849	91.22
1272	Tanjungbalai	449.746.983	410,581,497	91.29
1273	Pematangsiantar	622.331.041	565,804,258	90.92
1274	Tebing Tinggi	435.517.303	408,960,659	93.90
1275	Medan	1.707.061.801	1,493,919,764	87.51
1276	Binjai	595.614.977	535,778,557	89.95
1277	Padangsidempuan	527.226.559	476,335,400	90.35
1278	Gunungsitoli	452.305.776	406,222,095	89.81

Sumber : K-2 Realisasi APBD 2020

Lampiran 12. Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

Kode	Kabupaten/Kota	Alokasi 2021 (000 Rp)
(1)	(2)	(3)
1200	Provinsi Sumatera Utara	2.545.202.693
1201	Nias	426.273.979
1202	Mandailing Natal	766.908.677
1203	Tapanuli Selatan	615.254.051
1204	Tapanuli Tengah	623.187.906
1205	Tapanuli Utara	617.410.172
1206	Toba	527.775.092
1207	Labuhanbatu	659.351.692
1208	Asahan	845.782.109
1209	Simalungun	1.157.869.531
1210	Dairi	575.549.527
1211	Karo	701.606.434
1212	Deli Serdang	1.399.718.855
1213	Langkat	1.117.780.638
1214	Nias Selatan	637.989.763
1215	Humbang Hasundutan	497.770.762
1216	Pakpak Bharat	329.109.170
1217	Samosir	427.830.255
1218	Serdang Bedagai	741.896.149
1219	Batu Bara	573.892.742
1220	Padang Lawas Utara	530.916.406
1221	Padang Lawas	506.486.046
1222	Labuhanbatu Selatan	488.398.593
1223	Labuhanbatu Utara	570.739.426
1224	Nias Utara	401.228.290
1225	Nias Barat	340.435.104
1271	Sibolga	397.258.578
1272	Tanjungbalai	416.591.491
1273	Pematangsiantar	575.194.109
1274	Tebing Tinggi	399.645.141
1275	Medan	1.576.566.420
1276	Binjai	550.250.084
1277	Padangsidempuan	483.580.247
1278	Gunungsitoli	412.635.036

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>

Lampiran 13. Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

Kode	Kabupaten/Kota	Alokasi 2022 (000 Rp)
(1)	(2)	(3)
1200	Provinsi Sumatera Utara	2.463.686.589
1201	Nias	412.621.552
1202	Mandailing Natal	743.340.668
1203	Tapanuli Selatan	595.549.093
1204	Tapanuli Tengah	603.228.847
1205	Tapanuli Utara	597.808.962
1206	Toba	510.871.853
1207	Labuhanbatu	638.234.403
1208	Asahan	818.693.947
1209	Simalungun	1.120.786.035
1210	Dairi	557.382.089
1211	Karo	679.135.837
1212	Deli Serdang	1.354.889.566
1213	Langkat	1.081.981.083
1214	Nias Selatan	617.556.640
1215	Humbang Hasundutan	481.987.960
1216	Pakpak Bharat	318.945.304
1217	Samosir	414.328.359
1218	Serdang Bedagai	718.135.179
1219	Batu Bara	555.512.477
1220	Padang Lawas Utara	513.951.816
1221	Padang Lawas	490.835.624
1222	Labuhanbatu Selatan	472.807.253
1223	Labuhanbatu Utara	552.684.492
1224	Nias Utara	389.171.996
1225	Nias Barat	330.192.600
1271	Sibolga	384.535.437
1272	Tanjungbalai	403.249.168
1273	Pematangsiantar	556.772.164
1274	Tebing Tinggi	386.845.565
1275	Medan	1.526.073.171
1276	Binjai	532.627.031
1277	Padangsidempuan	468.092.452
1278	Gunungsitoli	399.419.428

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/DBH-DAU-DID-Otsus-Dais-Dandes-TA-2022.pdf>



Sensus
Penduduk
2020



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123
Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773
Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

